

Judul : Perkuat koordinasi, geologi dan BMKG sebaiknya digabung
Tanggal : Kamis, 10 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Perkuat Koordinasi Geologi Dan BMKG Sebaiknya Digabung

FOTO: IG PRISAKI



Lasarus

KETUA Komisi V DPR Lasarus mendukung wacana pengintegrasian Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Langkah itu diyakini mampu memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan efisiensi penanganan bencana di Tanah Air. Penyederhanaan lembaga membuat alur komunikasi antarinstansi juga bisa berjalan jauh lebih mudah.

Lasarus mengatakan, Badan Geologi memiliki tugas utama mengamati aktivitas gunung berapi. Sedangkan BMKG memiliki instrumen serta SDM yang berkaitan dengan pengamatan geologi. "Penggabungan dua lembaga itu membuat komunikasi penanganan bencana lebih efektif dan juga efisien," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Kendati demikian, kendala administratif memang berpotensi muncul mengingat Badan Geologi berada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Penyelesaian persoalan integrasi itu sepenuhnya kewenangan Pemerintah. Namun yang jelas, penempatan fungsi geologi bersama BMKG lebih efektif

jika fokus utamanya diarahkan pada penanganan bencana.

Apalagi, penggunaan peralatan operasional milik BMKG sejauh ini telah banyak dimanfaatkan Badan Geologi untuk pengumpulan data geologi. Karena itu, DPR menyerahkan keputusan kebijakan integrasi sepenuhnya kepada Pemerintah. "Gagasan penyatuan dua lembaga ini dipandang sebagai langkah positif yang sangat baik untuk diterapkan," ucapnya.

Sependapat, Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menilai, penggabungan Badan Geologi dan BMKG akan membuat koordinasi kerja antar lembaga berjalan lebih efektif. Penyatuan dua struktur itu diyakini memperkuat koordinasi kelembagaan secara menyeluruh. Skema integrasi ini bakal mendorong peningkatan efektivitas operasional kedua instansi.

Huda menyebut, upaya penanganan kebencanaan sejak awal idealnya berada di dalam satu wadah kelembagaan terpadu. Sebab, pelaksanaan urusan kebencanaan selama ini masih tersebar luas di berbagai kementerian serta lembaga. Penguatan mitigasi pra-bencana sangat membutuhkan integrasi kelembagaan, setidaknya antara Badan Geologi dengan pihak BMKG.

Penyatuan dua badan itu, lanjutnya, bakal memenuhi sasaran utama yang selama ini dicita-citakan dalam penanggulangan. Yakni seluruh potensi kebencanaan dapat diantisipasi secara tepat sejak dini melalui pengintegrasian kelembagaan. "Di saat yang sama, tahapan penanganan pascabencana juga bisa dikelola lebih optimal oleh lembaga yang terintegrasi," tegasnya. ■ PYB